

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. 2023. *Asas Berlakunya Undang – Undang yang Harus Diketahui*. Umsu. <https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harus-diketahui/>
- Ansori, L. 2015. “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Yuridis*. Vol. 2(1). hlm. 143. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa’at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). Cetakan pertama. hal. 100
- Asshiddiqie, J. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 119. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=1537&lokasi=lokal>
- Astawa, I.G.P. 2024. "Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara". *Jurnal LITIGASI*. Vol. 25 (2). pp. 20–42. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>
- Deliarnoor, N. A. 2002. *Sistem Hukum Indonesia Edisi ketiga*. Cet. pertama. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. hlm. 6.33.
- Dotulong, S. 2018. Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*. Vol. VI. No. 4. hlm. 183. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24538>
- Dwitama, S. E. 2018. ”Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan dan Tindakan yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Yustitia*, Vol. 4. Issue. 2, p. 178-187. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.45>
- Erwinsyabhana, T and Syabhana, T.R.F. 2018. Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5(2). hlm. 2. https://www.researchgate.net/profile/Tengku-Erwinsyabhana/publication/326138919_Perspektif_Negara_Hukum_Indonesia_Berdasarkan_Pancasila.pdf
- Faizin, A. 2021. *Surat Keputusan Bersama Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Perspektif Masalah Mursalah* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta). <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46561>

- Hadi, F. dan Gandryani, F. 2022. "Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 3. December 2022; 582-609, hlm. 583. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.7>
- Hadi, Syofyan dan Michael, T. 2017. Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 2, <https://fh.untag-sby.ac.id/berita-123-prinsip-keabsahan-rechtmatigheid-dalam-penetapan-keputusan-tata-usaha-negara.html> (diakses tanggal 3 Januari 2025).
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX Nopember –Desember, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6. <https://doi.org/10.20473/ydk.v8i1.5762>
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 88. https://ugmpress.ugm.ac.id/userfiles/product/daftar_isi/Daftar_Isi_Pengantar_Hukum_Administrasi_Indonesia.pdf
- Hakim, L. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 17-18, <https://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku%20Ajar%20Asas-Asas%20Hukum%20Pidana.pdf>
- Hamzah, M. G. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, hlm. 11, https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf
- Hasibuan, R. P. P. M. dan Ashari, A. 2020. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 7. No. 7, <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15379>
- HR, Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Cetakan ke16, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim dan Nurbani, E. S. 2022. *Penetapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. keenam. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12.
- Huda, N. 2021. Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 28. Issue 3, hlm. 560, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>

Hukumonline.com 2023. Asas Non-Retroaktif, tersedia di:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-non-retroaktif-lt4c80ae57a77f0> (diakses, 14/2/2023)

Indymadjid, Rayhan Zidane. 2024. “Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Hukum Acara”, Kampus Akademik Publishing, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol.1, No. 4. Juli, e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 1007-1014. DOI : <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2157>

Jiwantara, F. A. et. al. 2020. “Keputusan Sebagai Norma Penutup dalam Instrumen Hukum Pemerintahan”. *Jurnal Education and development*. Vol. 8. No. 4. p. 578-584. [file:///C:/Users/DELL/Downloads/2229-File%20Utama%20Naskah-4468-1-10-20201119%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/2229-File%20Utama%20Naskah-4468-1-10-20201119%20(1).pdf)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya https://api-rsudbudhiah.sih.jakarta.go.id/filemanagement/media/website/PDF/D.%20Keputusan%20Kementrian/D.3%20KEPMENKES_104_2020_Penetapan_Infeksi_covid.pdf

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) <https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/KMK%202020%20Juknis%20Klaim%20Covid19.pdf>

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4344 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 <https://infooperaturan.id/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk-01-07-menkes-4344-2021/>

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) <https://peraturan.infoasn.id/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk-01-07-menkes-1112-2022/>

Koentjoro, D. H. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 34.

- Kompas.com. 2020. Anies Terbitkan Pergub Denda Progresif, Berulang Kali Tak Pakai Masker Bisa Didenda Rp 1 Juta, tersedia di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/21/07002631/anies-terbitkan-pergub-denda-progresif-berulang-kali-tak-pakai-masker>
- Kusnadi, N. 2011, Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Academia*, 7. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20180117095958.pdf>
- Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 <https://jdih.kemkes.go.id/dokumen/index?page=133&per-page=5>
- Mertokusumo, S. 2022. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan III. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 228.
- Mochtar, Z. A. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Cet. pertama, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, hlm. 18.
- Ponce, J. 2005. "Good Administration and Administrative Procedures", dalam *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 12 Issue 2, pp.551-588, <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1310&context=ijgls>
- Prastiwi, D. 2020, *Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing*, tersedia di: <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-Covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>, (diakses 23 Desember 2023)
- Pratiwi, C. S., dkk. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm. 48, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-Yang-Baik.pdf>
- Putra, H. P. 2020. "Penilaian terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan", Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3. No. 1. hlm. 38-39, <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>
- Rahmah, Maulida et. al. 2024. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan dalam Konsep Hak Asasi Manusia, *Journal of Science and*

Social Research, VII (1), hlm. 294,
<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>

Ramadhan, D. A. 2020. *Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Kompak, Penanganan Pandemi Covid-19 Jadi Lambat*, tersedia di:
https://www.vice.com/id_id/article/y3zbkv/pemerintah-pusat-dan-daerah-tak-kompak-penanganan-pandemi-Covid-19-jadi-lambat, (diakses 23 Desember 2023)

Raz, J. 2019. Legal Validity, Oxford Scholarship online, *Oxford Journal of Legal Studies*. Volume 39. Issue 1. Pages 1–15.
<https://doi.org/10.1093/ojls/gqy041>

Rusydi, J., Januri dan Santina, R. 2023, “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Audi Et AP: *Jurnal Penelitian Hukum* 2. no. 01 : 54–63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>

Sanyeto, M.F.Y. 2023. *Tinjauan Yuridis Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Ptun (Studi kasus: Putusan Nomor: 215/G/2021/PTUNJKT)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional), National Journal of Law. Vol. 8. No. 1. hlm. 108,
<http://repository.unas.ac.id/id/eprint/8522>

Soebroto, A. C. *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, hlm.5, [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP Peraturan kebijakan di Kementerian PPN bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf).

Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11-12.

Sofyanoor, A. 2022. “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1. no. 2. h. 21–30.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>.

Solechan, S. 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, [Online] Volume 2(3), pp. 541-557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557> [Accessed : 31 Jan. 2025].

Sucipta, P. R. 2014. Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan

- Asas Praesumptio Iustae Causa”, *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1. hal 174.
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/124>.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV, hlm. 54
- Sunggono, B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.
<https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/597-materials.pdf>
- Suratno, Sadhu B. 2017. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *e-Journal Lentera Hukum*, vol. 4. no. 3. pp. 164-174. doi:[10.19184/ejhl.v4i3.5499](https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499).
- Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/214738/keputusan-kepala-bnpb-no-13a-tahun-2020>
- Surya, A. dkk. 2020. *Teori Hukum “Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya dengan Moral.”* hlm. 151-152.
- Syarif, A. 1987. *Perundang-undangan dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: PT. Bina Mulia, hal. 11. URI:
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20164679&lokasi=lokal>
- Syarifudin, A. *Dilematik Satu Bentuk Peraturan Dan Keputusan*, IAIN Metro Lampung Source: <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/dilematik-satu-bentuk-peraturan-dan-keputusan/>
- Tjandra, W.R. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=NIwmEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=related:sipCHjQp4S8J:scholar.google.com/&ots=oxtmh0VRmf&sig=bd4tMCZkRKBt1BcE-iGZpQg1mzo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Tumadi, N. H. 2023. “Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)”, *Siyasah: Jurnal hukum tata negara*. Vol. 6(2). pp. 62–76. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77)
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45377/uu-no-43-tahun-1999>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40500/uu-no-9-tahun-2004>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40787>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>

Widodo, Hananto dan Disantara, Pradhana Putra, 2021, “Problematisasi Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No. 1 Maret 2021: 197-226, hlm. 198. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>

World Health Organization. 2020. *Pneumonia of unknown cause – China*, <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/>, (diakses pada 27 September 2022 pukul 09:30 WIB).

Yuliandri. 2022. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 47-48.

Yustina, E.W. 2015. Hak atas kesehatan dalam program jaminan kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Kisi Hukum*. Vol. 14(1). pp. 93-111.

https://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/461/pdf_6

